

Dorong Kreativitas PAD, DPRD Minta Rekomendasi LKPJ Masuk RKPD 2027

BANDUNG, Prolite – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H, menyoroti potensi berkurangnya transfer keuangan daerah dari pusat ke pemerintah kota. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi pemicu bagi Pemkot Bandung untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Asep menyebut, sejumlah sektor masih memiliki peluang besar untuk dioptimalkan.

“Dari retribusi parkir ada harapan besar. Kemudian sektor pariwisata, termasuk restoran, juga masih punya potensi yang bisa digali lebih maksimal,” ujarnya.

Disinggung mengenai capaian PAD tahun ini, Asep mengakui hal tersebut belum bisa diukur secara pasti. Pasalnya, saat ini masih memasuki semester pertama tahun anggaran.

Baca Juga:Jual Beli Kursi SPMB 2026 akan Dipidana, Wali Kota Bandung Tidak Kasih Celah

“Sekarang belum terukur, karena masih semester satu. Nanti kita lihat perkembangan di semester dua,” katanya.

Lebih lanjut, Asep menekankan pentingnya hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah agar tidak berhenti sebatas rekomendasi. Ia berharap, seluruh catatan dan masukan DPRD dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

“Sayang kalau kita sudah memberikan rekomendasi dengan berbagai harapan, tapi tidak masuk dalam perencanaan 2027. Makanya pembahasan dilakukan intensif, agar hasil LKPJ ini bisa menjadi jembatan untuk dieksekusi pada tahun mendatang,” tegasnya.

Selain itu, Asep juga memberikan catatan khusus kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia meminta agar BUMD mampu membaca peluang sekaligus memahami akar persoalan yang ada.

“BUMD harus mampu membaca situasi, memahami sumber masalah, dan menentukan arah ke depan,” ucapnya.

Baca Juga: Evaluasi LKPJ Jangan Sekadar Formalitas, Pansus DPRD Kota Bandung Dorong RKPD 2027 Lebih Menyentuh Kebutuhan Warga

Dalam konteks misi pembangunan daerah, khususnya misi keempat yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan aset, Asep menekankan pentingnya optimalisasi aset yang dimiliki pemerintah. Ia juga mendorong inovasi dalam meningkatkan pendapatan, disertai efisiensi pengelolaan anggaran.

“Pemerintah harus bisa mengoptimalkan aset, meningkatkan pendapatan secara kreatif dan inovatif, serta melakukan efisiensi. Tapi yang paling penting, jangan sampai kebijakan itu justru mengorbankan masyarakat,” pungkasnya.



Baca Selanjutnya
Jelang Iduladha 2026, Bandung Perketat Aturan Lokasi Penjualan Hewan Kurban